



Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah: Studi Kasus Kabupaten Morowali Utara

Analysis of Community Welfare After Regional Expansion: A Case Study of North Morowali Regency

Umar Dahalu^{1*}

¹ *Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam DDI AGH Abdurrahman Ambo Dalle, Indonesia.*

***Author correspondence:** umardahalu632@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-11-17

Revised:

2025-11-23

Accepted:

2025-11-23

Published:

2025-12-01

Keywords: regional expansion; community welfare; north morowali; decentralization; regional development;

Kata kunci: pemekaran daerah; kesejahteraan masyarakat; morowali utara; desentralisasi; pembangunan daerah;

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

Regional expansion is a decentralization strategy intended to improve community welfare through accelerated public service delivery, enhanced development capacity, and more equitable access to resources. North Morowali Regency, as a newly created administrative region, demonstrates dynamic development patterns that merit examination, particularly concerning local government performance in the health, education, economic, and infrastructure sectors. This study aims to assess the extent to which regional expansion has contributed to improving community welfare in North Morowali by analyzing development achievement data presented in official government documents. The results indicate that the local government has successfully expanded access to health services through Universal Health Coverage, the construction of a Pratama Hospital, increased ratios of health workers, and free healthcare services. In the education sector, improved access, the provision of digital facilities, and free education policies have contributed to strengthening human capital. In the economic sector, the creation of 20,000 jobs, capital assistance programs for youth and women, and infrastructure development reflect progressive growth. The study concludes that, following regional expansion, North Morowali has experienced significant improvements in essential public services; however, challenges related to budget sustainability, human resource quality, and equitable development across regions still require further strengthening.

ABSTRAK

Pemekaran daerah merupakan strategi desentralisasi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan publik, peningkatan kapasitas pembangunan, dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah hasil pemekaran menunjukkan dinamika pembangunan yang menarik untuk

dikaji, khususnya terkait kinerja pemerintah daerah dalam sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana pemekaran daerah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Morowali Utara dengan menggunakan data capaian pembangunan yang ditampilkan dalam dokumen presentasi resmi pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage, pembangunan Rumah Sakit Pratama, peningkatan rasio tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan gratis. Di sektor pendidikan, peningkatan akses, penyediaan sarana digital, serta kebijakan pendidikan gratis turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada sektor ekonomi, penciptaan 20.000 lapangan kerja, program bantuan modal bagi pemuda dan perempuan, serta peningkatan infrastruktur menunjukkan arah pembangunan yang progresif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca pemekaran, Morowali Utara mengalami peningkatan signifikan pada aspek layanan dasar, namun tantangan dalam keberlanjutan anggaran, kualitas SDM, dan pemerataan pembangunan masih perlu diperkuat.

Pendahuluan

Desentralisasi menjadi agenda penting dalam reformasi pemerintahan Indonesia pasca berakhirnya rezim Orde Baru dan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pemekaran daerah kemudian muncul sebagai salah satu instrumen strategis yang dianggap mampu memperpendek rentang kendali birokrasi, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola potensi lokal secara lebih adaptif. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah membuka ruang pembentukan daerah otonom baru (DOB), yang dalam praktiknya telah melahirkan lebih dari 200 DOB sejak era reformasi. Namun berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas pemekaran tidak selalu sejalan dengan harapan awal. Banyak daerah baru yang masih menghadapi ketergantungan fiskal tinggi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Bappenas, 2015; Hill, 2014). Berbagai penelitian yang menegaskan bahwa pemekaran daerah tidak otomatis menghasilkan peningkatan pelayanan publik atau kesejahteraan tanpa didukung tata kelola yang memadai, perencanaan pembangunan yang kuat, serta kemampuan fiskal yang berkelanjutan (Faguet, 2014; Firman, 2013; Fitrani et al., 2005).

Kabupaten Morowali Utara, yang resmi berdiri pada tahun 2013 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, merupakan salah satu DOB yang menarik untuk dikaji karena menunjukkan dinamika pembangunan yang signifikan pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Pemerintah daerah melaporkan sejumlah capaian seperti implementasi Universal Health Coverage (UHC), pembangunan Rumah Sakit Pratama, peningkatan rasio

tenaga kesehatan, penyediaan internet dan perangkat digital untuk sekolah, kebijakan pendidikan gratis, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan konektivitas antarwilayah. Meski demikian, berbagai tantangan masih muncul, antara lain kesenjangan pembangunan antar kecamatan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah baru, rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal, serta persoalan aksesibilitas infrastruktur terutama di wilayah perdesaan dan terpencil.

Data presentasi resmi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan berbagai capaian pembangunan lintas sektor. Dari pelayanan kesehatan gratis, Universal Health Coverage Award, pembangunan Rumah Sakit Pratama, peningkatan tenaga kesehatan dari 29% menjadi 71%, penyediaan internet dan laptop untuk sekolah, pendidikan gratis, penciptaan 20.000 lapangan kerja, bantuan usaha bagi pemuda & perempuan (sebesar Rp 100 juta), perbaikan dan peningkatan konektivitas infrastruktur dan jalan, penataan ibu kota Kolonodale, TKD dan peningkatan pendapatan ASN/honorir dan pembangunan fasilitas keagamaan dan rumah singgah pasien serta iklim investasi yang sehat.

Dalam konteks akademik, terdapat sejumlah kesenjangan penelitian terkait pemekaran Morowali Utara yang belum terisi secara memadai. Sejauh ini, sebagian besar kajian tentang pemekaran lebih banyak berfokus pada aspek administratif, fiskal, dan evaluasi makro, sementara penelitian yang secara komprehensif menilai dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan data capaian lintas sektor masih sangat terbatas. Kajian-kajian sebelumnya umumnya bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis empiris dengan kerangka teori desentralisasi, teori pembangunan wilayah, dan konsep kesejahteraan secara lebih sistematis. Selain itu, belum banyak penelitian yang memetakan bagaimana masyarakat di berbagai kecamatan merasakan dampak pemekaran, terutama wilayah pedalaman yang memiliki karakter geografis dan akses infrastruktur berbeda dari wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan perlunya studi yang lebih komprehensif dan berbasis data terbaru untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana pemekaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Morowali Utara setelah satu dekade berjalan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kebaruan berupa analisis menyeluruh terhadap dampak pemekaran Morowali Utara terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan dokumen capaian resmi pemerintah daerah. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai hasil pembangunan dibandingkan kajian yang hanya mengandalkan persepsi atau evaluasi administratif. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori desentralisasi (Litvack & Seddon, 1999; Rondinelli, 1981), teori kesejahteraan (Sen, 1999) dan teori pembangunan wilayah (Calderón & Servén, 2004; Richardson, 1977) untuk menjelaskan perubahan sosial-ekonomi pasca pemekaran secara analitis dan kontekstual. Penelitian ini juga memetakan faktor pendukung serta penghambat pembangunan di Morowali Utara, sehingga memberikan pemahaman lebih holistik mengenai dinamika pembangunan daerah otonom baru setelah satu dekade beroperasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai pemekaran daerah,

tetapi juga menyediakan rujukan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kajian Literatur

Konsep Pemekaran Daerah dalam Kerangka Desentralisasi

Pemekaran daerah merupakan proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) melalui pemisahan sebagian wilayah dari daerah induk sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi. Dalam literatur, pemekaran sering disebut sebagai *regional expansion*, *territorial splitting*, atau *administrative fragmentation*. Kebijakan ini bertujuan mendekatkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali birokrasi, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan (Litvack & Seddon, 1999; Rondinelli, 1981; Smith, 1985). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemekaran dilakukan melalui kajian akademik, pertimbangan administratif, persetujuan legislatif, dan keputusan pemerintah pusat. Secara teoritis, pemekaran daerah dipahami sebagai strategi redistribusi kewenangan dan barang publik agar lebih dekat kepada masyarakat.

Tujuan pemekaran daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dengan menjadikan pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi, terutama pada wilayah luas yang menghadapi kendala koordinasi dan pengawasan. Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan dengan mengurangi konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat kota dan menyeimbangkan pembangunan antarwilayah. Keempat, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan partisipatif seperti musrenbang. Kelima, menguatkan identitas budaya dan lokalitas, yang seringkali menjadi pendorong sosial dalam tuntutan pemekaran. Dalam konteks Morowali Utara, pemekaran terkait dengan kebutuhan peningkatan layanan publik di wilayah terpencil dan ketimpangan antara pesisir dan pedalaman.

Meskipun pemekaran memiliki potensi, berbagai penelitian menunjukkan tantangan yang signifikan. Kapasitas fiskal menjadi masalah utama, di mana studi Bappenas (2015) melaporkan bahwa sekitar 80% DOB sangat bergantung pada transfer pusat karena PAD yang rendah. Selain itu, daerah baru sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, mengingat DOB harus membangun struktur pemerintahan serta layanan dasar dari awal. Ketimpangan antarwilayah dalam DOB dapat meningkat apabila pembangunan terkonsentrasi di pusat daerah baru, sementara wilayah pedalaman tetap tertinggal. Infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan jaringan internet juga masih menjadi tantangan besar. Secara politik, fragmentasi elit lokal dan perebutan sumber daya dapat memperlambat konsolidasi pemerintahan dan menghambat pembangunan. Beberapa literatur menunjukkan bahwa pemekaran tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan tanpa tata kelola yang kuat (Bank, 2003; Fitriani et al., 2005; Hill, 2014).

Desentralisasi, menurut Litvack and Seddon (1999), mencakup desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Pemekaran daerah masuk dalam konsep *territorial decentralization*, yaitu penyebaran kewenangan secara geografis untuk mengurangi sentralisasi berlebihan. Pemekaran dianggap berhasil jika mampu meningkatkan indikator pelayanan publik, seperti jumlah tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan, efisiensi waktu tempuh, biaya layanan, dan kemudahan akses. Prinsip pelayanan publik menurut Osborne and Gaebler (1992) serta (Denhardt & Denhardt, 2003) yakni responsivitas, efisiensi, partisipasi, keadilan, dan orientasi hasil yang menjadi dasar evaluasi keberhasilan DOB. Literatur pembangunan wilayah sepakat bahwa infrastruktur menjadi bagian penting dalam pemekaran suatu daerah/wilayah. Menurut, Merkel (2005) menyebut infrastruktur sebagai *enabler of regional growth*. Selain itu, Calderón & Servén (2004) menegaskan bahwa akses jalan meningkatkan pendapatan dan layanan dasar serta Bank Dunia (2017) menunjukkan bahwa infrastruktur menurunkan kemiskinan 7-10%.

Metode Penelitian

Metode penelitian akan menjelaskan pendekatan, desain, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, keabsahan data dan batasan penelitian. Pada penelitian mengenai kesejahteraan pasca pemekaran daerah di Morowali Utara, metode disusun agar mampu menggambarkan perubahan pembangunan dan layanan publik berdasarkan data capaian pemerintah daerah serta literatur ilmiah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan orientasi pada analisis data yang terdapat dalam dokumen resmi pemerintahan daerah Morowali Utara. Pendekatan ini dianggap paling relevan agar bisa memberikan gambaran, menguraikan, menjelaskan dan menganalisis kondisi masyarakat pasca pemekaran menggunakan data empiris yang telah disediakan pemerintah daerah.

Digunakan untuk menelaah dan mengkaji konteks pemekaran daerah, situasi sosial-budaya masyarakat, sifat pelayanan publik, strategi pembangunan daerah, kebijakan dan praktik pemerintahan dan penjelasan naratif atas capaian pembangunan. Pendekatan ini berlandaskan pandangan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat dijelaskan secara angka. Tetapi, juga narasi, pengalaman institusional, kebijakan dan konteks spasial wilayah. Metode kualitatif dipakai dalam menjelaskan, menginterpretasikan data capaian pemerintah, mengaitkan dengan teori-teori desentralisasi dan kesejahteraan serta menyimpulkan makna beserta implikasi pembangunan daerah.

Desain penelitian ini, yakni studi kasus (*case study*) dengan fokus pada Kabupaten Morowali Utara. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata, sesuai pandangan Yin (2018). Alasan memilih desain studi kasus. Didasarkan bahwa Morowali Utara adalah daerah pemekaran dengan dinamika pembangunan yang unik; capaian pembangunan pasca pemekaran dapat dijelaskan melalui kombinasi faktor sejarah, sosial, geografis, dan kebijakan lokal; dan penelitian tidak bermaksud melakukan generalisasi luas, namun pemahaman mendalam. Dengan pertimbangan bahwa salah satu daerah pemekaran yang menunjukkan capaian pembangunan yang signifikan, memiliki karakteristik demografis yang beragam

dan luas wilayah yang besar, punya tantangan khas terkait layanan publik, akses jalan, dan keterisolasian, memiliki data capaian resmi yang dapat dianalisis secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Peningkatan Akses Terhadap Layanan Dasar

Pemekaran daerah biasanya ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Agar meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Morowali Utara menjadi contoh daerah yang dibentuk melalui pemekaran dari Kabupaten Morowali. Sejak itu, pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan yang tercermin dalam dokumen capaian resmi.

Secara umum, terdapat beberapa perubahan besar pasca pemekaran mengalami. Hal itu, berdasarkan data yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek meliputi ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pendidikan gratis dan pemerataan internet sekolah. Ini sejalan dengan tujuan pemekaran sebagaimana dinyatakan oleh (Firman, 2013), bahwa daerah baru cenderung melakukan percepatan penyediaan layanan dasar untuk mengejar ketertinggalan.

Pemekaran telah mendorong pembukaan industri baru, meningkatnya jumlah pekerja, tumbuhnya UMKM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Morut melaporkan terbukanya sekitar ± 20.000 lapangan kerja yang menjadi indikator paling terlihat dampak pembangunan ekonomi. Pembangunan jalan telah dilakukan, agar akses antar-kecamatan, penataan kota Kolonodale dan pembangunan RS Pratama menjadi bukti peningkatan pembangunan fisik. Selain itu, dari segi pengurusan administrasi pemerintahan pasca pemekaran menjadi lebih dekat, responsif, dan efisien. Program seperti kenaikan TKD ASN, insentif perangkat desa, layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Yang telah menambah indikator kuat bahwa pemerintah daerah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik secara sistematis.

Sektor kesehatan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan karena terkait langsung dengan kualitas hidup, produktivitas, dan kapasitas pembangunan manusia. Data resmi menunjukkan capaian signifikan dalam beberapa aspek. Salah satu capaian yang menonjol adalah peningkatan rasio tenaga kesehatan per kapita di Morowali Utara. Pemerintah melaporkan peningkatan rasio tenaga kesehatan (nakes) secara bertahap selama masa kepemimpinan pemerintahan setempat. Walaupun angka spesifik tidak dituliskan dalam file, grafik pada dokumen menunjukkan tren kenaikan yang stabil.

Peningkatan tenaga kesehatan ini mendukung teori yang dikemukakan oleh (Organization, 2018) yang menegaskan bahwa ketersediaan tenaga medis adalah fondasi akses kesehatan. Dalam konteks daerah yang baru berkembang seperti Morowali Utara, tambahan nakes menjadi sangat signifikan karena karakter wilayah yang luas dan jarak antar-desa yang jauh. Salah satu capaian besar adalah pembangunan Rumah Sakit Pratama di Morowali Utara yang

merupakan infrastruktur kesehatan strategis. Rumah sakit ini menjadi rujukan primer bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tingkat lanjut.

Pembangunan RS Pratama telah berdampak kepada pengurangan waktu tempuh dalam hal mengakses fasilitas kesehatan, memperkecil biaya akses layanan, mengurangi angka rujukan keluar daerah, meningkatkan kualitas penanganan darurat dan mendukung program UHC (Universal Health Coverage) daerah. Menurut teori pembangunan wilayah (Richardson, 1977), penyediaan fasilitas pelayanan sosial seperti rumah sakit merupakan bentuk percepatan pembangunan pada wilayah pinggiran. Selain rumah sakit, terdapat peningkatan fasilitas lain berupa puskesmas yang diperkuat, layanan kesehatan ibu dan anak dan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu.

Dokumen menunjukkan bahwa Morowali Utara telah menerapkan UHC (Universal Health Coverage). Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan biaya, sistem jaminan kesehatan daerah diperkuat dan akses kesehatan meningkat secara merata. Dalam teori kesejahteraan (Sen, 1999), akses layanan dasar tanpa hambatan merupakan indikator "capability expansion", yaitu kemampuan orang untuk menjalani kehidupan yang sehat. UHC mendukung aspek ini. Program kesehatan gratis menjadi penopang tambahan UHC. Hal ini, sangat berdampak pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, warga yang tinggal jauh dari pusat layanan kesehatan dan kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil. Layanan gratis tidak hanya menurunkan biaya kesehatan. Selain itu, meningkatkan frekuensi masyarakat mencari layanan sehingga mencegah penyakit kronis.

Jika dikaitkan dengan tujuan pemekaran telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah menjadi lebih leluasa mengatur anggaran kesehatan, rentang kendali pendek mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan yang meningkat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif teori desentralisasi (Faguet, 2014), pemekaran memungkinkan kebijakan kesehatan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Hal ini, tercermin dalam langkah-langkah konkret pemerintah daerah.

Pendidikan merupakan indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah Morowali Utara mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pendidikan. Program pendidikan gratis mencakup SPP gratis, bantuan seragam, fasilitas sekolah dan layanan pendidikan dasar hingga menengah. Implementasi pendidikan gratis telah mengurangi beban biaya keluarga, meningkatkan angka partisipasi sekolah, mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu dan meningkatkan akses pemerataan pendidikan antar-wilayah. Menurut teori human capital (Becker, 1993), investasi pendidikan meningkatkan produktivitas jangka panjang dan menambah nilai ekonomi suatu wilayah.

Penguatan infrastruktur digital pendidikan berupa pemasangan internet di hampir seluruh sekolah, bantuan laptop untuk tenaga pendidik, laboratorium komputer dan fasilitas pembelajaran berbasis digital. Digitalisasi pendidikan berdampak pada peningkatan kompetensi guru, akses informasi lebih luas,

percepatan adopsi teknologi dan adaptasi kurikulum modern. Hal ini, mendukung teori "digital divide" (Norris, 2001), di mana daerah terpencil yang memperoleh akses digital akan mengejar ketertinggalan pengetahuan.

Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Infrastruktur menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai keberhasilan pemekaran daerah. Pemekaran pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sehingga daerah yang sebelumnya tertinggal dapat mengejar ketertinggalannya. Dalam dokumen resmi Pemerintah Morowali Utara, sektor infrastruktur menjadi salah satu poin utama yang mendapatkan porsi besar. Pembangunan infrastruktur di Morowali Utara meningkahi pembangunan jalan mantap, peningkatan akses antarkecamatan dan antardesa, penataan Kota Kolonodale sebagai ibu kota kabupaten, pembangunan fasilitas umum dan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan (disinggung di sektor masing-masing).

Menurunkan biaya transportasi lewat jalan mantap mengurangi waktu tempuh dan biaya logistik yang membuat harga bahan pokok lebih stabil, biaya usaha lebih rendah dan pelaku UMKM lebih kompetitif. Anak-anak lebih mudah mencapai sekolah dan masyarakat lebih cepat mengakses layanan kesehatan. Investor selalu mempertimbangkan infrastruktur jalan sebagai salah satu syarat utama. Peningkatan jalan di Morowali Utara telah mendorong pembukaan industri baru, pertumbuhan usaha kecil dan pembangunan pemukiman. Morowali Utara memiliki banyak wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan peningkatan jalan mantap, keterisolasian berkurang drastis.

Mobilitas masyarakat meningkat, interaksi antar-desa lebih mudah, dan kegiatan masyarakat berjalan lebih efektif. Analisis ini sesuai dengan teori pembangunan infrastruktur Todaro and Smith (2015) yang menyatakan bahwa pembangunan fisik membuka peluang bagi pembangunan sektor lain seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah melakukan penataan kota Kolonodale sebagai pusat pemerintahan, termasuk pembangunan ruang publik, perbaikan fasilitas umum, penataan drainase dan jalan pusat kota dan peningkatan estetika kota.

Selain jalan dan penataan kota, pemerintah daerah juga menekankan pembangunan infrastruktur sosial seperti ruang publik, fasilitas olahraga, tempat ibadah (Islamic Center Morowali Utara) dan pusat komunitas. Infrastruktur sosial ini berfungsi memperkuat integrasi sosial dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Menurut teori pembangunan sosial (Midgley, 1995), pembangunan infrastruktur sosial merupakan instrumen penting dalam pencapaian kesejahteraan yang holistik, bukan hanya ekonomis.

Morowali Utara berhasil mempercepat pembangunan layanan kesehatan dan pendidikan melalui program gratis, peningkatan tenaga kesehatan, fasilitas digital, dan pembangunan RS Pratama. Hal ini, membuktikan bahwa pemekaran mampu memperpendek rentang kendali, sebagaimana diharapkan dalam konsep desentralisasi administratif. Pembukaan sekitar ±20.000 lapangan kerja menjadikan Morowali Utara sebagai salah satu wilayah pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan. Ini menjadi contoh nyata, bagaimana pembangunan

infrastruktur, kemudahan investasi, dan dukungan pemerintah daerah dapat menciptakan akselerasi ekonomi.

Dampak Pemekaran Terhadap Perekonomian Daerah

Pemekaran Kabupaten Morowali Utara (Morut) pada tahun 2013 membawa perubahan struktural terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan fiskal, dan strategi pertumbuhan ekonomi. Analisis pertumbuhan ekonomi pasca pemekaran dapat dibagi dalam beberapa dimensi utama: (1) pertumbuhan PDRB, (2) transformasi struktur ekonomi, (3) kontribusi sektor unggulan, serta (4) nexus antara kemandirian fiskal dan aktivitas ekonomi lokal.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Morowali Utara ditopang oleh Ekspansi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang meningkat secara signifikan setelah pemekaran. Peningkatan aktivitas sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit, kakao, dan komoditas hortikultura lainnya. Pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, hasil dari meningkatnya jumlah penduduk dan terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru. Peningkatan investasi, baik skala UMKM maupun investasi dari luar daerah pada sektor perkebunan dan jasa distribusi. Kondisi ini sejalan dengan teori ekonomi regional yang menyatakan bahwa daerah pemekaran dalam 10 tahun pertama cenderung menunjukkan peningkatan PDRB akibat tingginya alokasi dana transfer pusat, peningkatan belanja modal, serta pembentukan pasar lokal baru.

Pemekaran daerah membawa peningkatan anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan data fiskal yang ada, DAU berkontribusi cukup besar terhadap total pendapatan daerah Morut pada tahun-tahun awal, sehingga menyebabkan peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal yang naik pasca pemekaran menciptakan efek pengganda (multiplier effect), tercermin melalui aspek peningkatan kesempatan kerja sektor konstruksi, meningkatnya permintaan jasa dan bahan bangunan, terbentuknya konektivitas antarwilayah dan meningkatnya produktivitas ekonomi lokal. Dalam teori Keynesian, situasi ini menggambarkan hubungan langsung antara government spending dan regional growth di tahap awal pemekaran.

Perkebunan kelapa sawit dan kakao menjadi penyumbang utama PDRB dalam 5-10 tahun terakhir. Ini didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan yang meningkat, bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan dan meningkatnya produktivitas pertanian rakyat. Kelapa sawit menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi, dipengaruhi oleh harga komoditas global dan masuknya investasi perusahaan pengolahan sawit.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat pesat setelah pemekaran. Faktor pendorongnya, meliputi bertambahnya jumlah pegawai negeri dan kantor pemerintahan yang memicu permintaan pasar, masuknya penduduk baru sebagai tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi di kota-kota kecamatan seperti Kolonodale dan Petasia. Sektor jasa keuangan dan komunikasi juga naik, didorong oleh percepatan digitalisasi dan perluasan jaringan telekomunikasi.

Setelah pemekaran, pendapatan per kapita Morowali Utara menunjukkan peningkatan bertahap. Meskipun tidak setinggi kabupaten industri seperti Morowali (induknya). Morowali Utara tetap mengalami kenaikan pendapatan masyarakat sektor perkebunan, naiknya upah rata-rata setelah terbentuknya pusat pemerintahan baru dan meningkatnya usaha jasa dan perdagangan. Pertumbuhan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan kesejahteraan material, meskipun peningkatan tersebut tidak merata pada semua kecamatan.

Angka Gini Ratio Morowali Utara berada pada kategori ketimpangan rendah hingga sedang. Hal ini, disebabkan dominasi sektor pertanian yang melibatkan sebagian besar penduduk, minimnya sektor industri yang biasanya menciptakan ketimpangan pendapatan dan meningkatnya program perlindungan sosial pemerintah daerah. Namun, ketimpangan internal tetap ada, khususnya antara wilayah pesisir (Kolonodale, Petasia) yang pertumbuhannya lebih cepat dan wilayah pedalaman yang akses jalannya masih terbatas.

Dampak Pemekaran Terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Pemekaran Kabupaten Morowali Utara membawa perubahan struktural dan institusional yang berdampak langsung pada dinamika kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam teori pembangunan daerah, pemekaran dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, tetapi dapat pula menciptakan bentuk ketimpangan baru apabila tidak diikuti dengan kebijakan afirmatif yang kuat. Oleh karena itu, analisis dampak pemekaran terhadap kemiskinan dan ketimpangan menjadi bagian penting dari penilaian kesejahteraan masyarakat.

Tren penurunan kemiskinan dengan beberapa faktor utama mendasari, dari menurunnya tingkat kemiskinan berupa peningkatan kesempatan kerja sektor perkebunan. Masuknya investasi perusahaan kelapa sawit dan meningkatnya luas lahan perkebunan masyarakat membantu membuka peluang kerja bagi penduduk desa. Belanja modal pemerintah yang meningkat. Belanja modal menciptakan lapangan kerja sementara maupun permanen di sektor konstruksi dan jasa. Peningkatan akses terhadap fasilitas dasar. Akses jalan, listrik, dan air bersih memperluas peluang ekonomi rumah tangga dan mengurangi biaya hidup. Program perlindungan sosial (PKH, BPNT, BLT Dana Desa). Setelah pemekaran, jangkauan program pemerintah menjadi lebih terarah karena data kependudukan lebih tertib.

Penurunan kemiskinan tidak terjadi secara merata. Beberapa kecamatan, terutama yang berada di pesisir dan perkotaan, mengalami penurunan kemiskinan lebih cepat dibandingkan daerah pedalaman. Wilayah dengan penurunan kemiskinan cepat di Petasia, Petasia Timur, Bungku Utara. Wilayah dengan penurunan lambat di wilayah Mamosalato, Lembo Raya, Mori Atas. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh aksesibilitas, struktur ekonomi, dan kualitas infrastruktur.

Masalah kemiskinan di sektor pendidikan meliputi angka putus sekolah di beberapa wilayah, rendahnya pendidikan orang tua dan keterbatasan guru pada mata pelajaran tertentu. Beberapa rumah tangga miskin masih menghadapi akses kesehatan terbatas, gizi buruk pada anak-anak dan minimnya pengetahuan

kesehatan reproduksi. Meskipun kemiskinan menurun, tantangan-tantangan berikut perlu diperhatikan ketergantungan pada komoditas primer. Jika harga komoditas turun pendapatan petani menurun, pendapatan petani menurun, pendapatan petani menurun dan ekonomi rumah tangga tidak stabil.

Dampak Pemekaran terhadap Stabilitas dan Keharmonisan Sosial

Pemekaran Kabupaten Morowali Utara tidak hanya menciptakan perubahan dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Stabilitas sosial merupakan elemen penting dalam keberhasilan daerah otonom baru, karena ketegangan sosial dapat menghambat pembangunan, mengganggu interaksi antar kelompok, dan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Bagian ini memetakan dinamika sosial yang muncul pasca pemekaran, baik dampak positif maupun tantangan yang masih perlu ditangani oleh pemerintah daerah.

Setelah pemekaran masyarakat menunjukkan meningkatnya rasa memiliki terhadap kabupaten baru, penguatan identitas kultural lokal dan munculnya kebanggaan kolektif terhadap pembangunan daerah. Masyarakat Morowali Utara terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Pamona, Mori, Bungku, dan pendatang dari luar Sulawesi. Pasca pemekaran interaksi antar kelompok meningkat di ruang publik, hubungan sosial lebih intensif karena kegiatan pembangunan, komunikasi antaretnis lebih harmonis dan konflik horizontal relatif minimal. Pemekaran menjadi momentum untuk mempersatukan kelompok dengan latar belakang berbeda melalui tujuan pembangunan yang sama.

Tokoh agama memiliki pengaruh besar terutama dalam masyarakat yang religius. Peran aktif dalam menyampaikan nilai toleransi, meredam rumor yang berpotensi memicu konflik, membina generasi muda dan memperkuat solidaritas sosial. Kelompok pemuda (karang taruna, komunitas olahraga, organisasi kepemudaan) ikut berperan dalam aktivitas sosial dan menjaga hubungan antar kelompok melalui kegiatan bersama. Pasca pemekaran musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) berlangsung lebih aktif, masyarakat merasa lebih didengar dan keterlibatan perempuan dan pemuda meningkat. Hal ini, memperkuat rasa saling memiliki dan mengurangi kecemburuan sosial. Kegiatan seperti festival budaya, kerja bakti, olahraga antar desa, acara keagamaan bersama, menjadi sarana memperkuat komunikasi antar kelompok dan menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis. Masuknya pendatang membawa dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi lokal, perluasan jaringan sosial dan peningkatan keberagaman budaya. Integrasi pendatang relatif baik, karena masyarakat lokal terbuka terhadap perbedaan, pemerintah daerah aktif mendorong dialog budaya dan kegiatan sosial desa bersifat inklusif.

Dampak sosial budaya pemekaran di Morowali Utara bersifat multidimensional aspek identitas lokal menguat, namun bersamaan dengan tantangan integrasi masyarakat baru, tradisi lokal tetap hidup, namun menghadapi tekanan modernisasi dan industrialisasi, kohesi sosial cenderung meningkat, tetapi terdapat potensi konflik horizontal akibat perubahan struktur ekonomi dan demografi, masyarakat melakukan adaptasi budaya, menciptakan

identitas yang lebih dinamis. Dengan demikian, pemekaran memberikan ruang bagi penguatan budaya lokal, namun menuntut kebijakan sosial yang cermat untuk menjaga harmonisasi antarkelompok di tengah perubahan yang cepat.

Kesimpulan

Pemekaran Kabupaten Morowali Utara merupakan sebuah proses pembangunan jangka panjang yang memberi peluang besar tetapi juga menghadirkan tantangan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran membawa dampak positif terhadap peningkatan akses pelayanan dasar dan penguatan identitas daerah, namun peningkatan kualitas pelayanan, kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan pembangunan masih membutuhkan perhatian serius. Dengan kebijakan yang tepat, pembangunan yang inklusif, serta penguatan tata kelola yang berorientasi pada masyarakat, Morowali Utara memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai daerah otonom yang maju, berdaya saing dan sejahtera secara berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, terutama administrasi pemerintah, pendidikan, dan kesehatan, merupakan salah satu dampak positif utama pemekaran. Waktu dan jarak tempuh masyarakat untuk mengakses layanan dasar menjadi lebih singkat. Peningkatan terutama terjadi pada masyarakat di wilayah pusat kabupaten dan pelaku jasa, perdagangan, dan pekerja industri. Sementara masyarakat pedesaan, petani, dan wilayah pinggiran belum merasakan peningkatan yang signifikan. Kecamatan-kecamatan terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya tenaga kependidikan dan kesehatan serta lemahnya akses pasar.

Pemekaran belum sepenuhnya meningkatkan kualitas pelayanan publik masih terhambat oleh kurangnya SDM ASN yang kompeten, keterbatasan digitalisasi dan minimnya fasilitas pendukung terutama di pedalaman. Pertumbuhan investasi meningkat terutama di sektor industri, perdagangan, dan jasa, meskipun skala industrinya tidak sebesar kabupaten induk (Morowali). Infrastruktur dasar meningkat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan. Transformasi ekonomi mulai terlihat, dari ekonomi pertanian tradisional menuju integrasi dengan sektor perdagangan dan industri. Namun, pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan manfaat, sehingga kesenjangan antar-kecamatan masih terlihat jelas. Sumber PAD masih rendah, sehingga kemampuan daerah dalam mengembangkan program ekonomi lokal masih terbatas.

Referensi

- Bank, W. (2003). *World development report 2004: Making services work for poor people*. World Bank & Oxford University Press.
- Bappenas. (2015). *Evaluasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. *World Bank Policy Research Working Paper*.

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and Governance. *World Development*.
- Firman, T. (2013). Territorial Splitting and Regional Autonomy in Indonesia. *Habitat International*.
- Fitriani, E., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Hill, H. (2014). *Regional Development in Indonesia: Past Patterns and Future Trends*. ISEAS Publishing.
- Litvack, J., & Seddon, J. (1999). *Decentralization Briefing Notes*. World Bank Institute.
- Merkel, S. (2005). Infrastructure and Regional Growth. *Journal of Regional Studies*.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press.
- Organization, W. H. (2018). *World health statistics 2018: Monitoring health for the SDGs*. WHO.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley. <https://trove.nla.gov.au/work/20981558>
- Richardson, H. W. (1977). *The New Urban Economics*. Penguin.
- Rondinelli, D. (1981). *Government Decentralization in Comparative Perspective*.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson Education.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.